

Dilemma Indonesia Dan Hambatan Asean Untuk Menjalankan Peranan Dalam Penyelesaian Konflik Timur Tengah,

Oleh Siti Mutiah Setiawati¹

Jarak Indonesia dengan Timur Tengah sebenarnya tidak dekat karena paling cepat 10 Jam penerbangan untuk mencapai negara terdekat seperti Uni Emirat Arab . Dari segi bahasa dan budaya Indonesia dengan Timur Tengah juga tidak mempunyai kesamaan. Satu faktor yang mendekatkan semua jarak tersebut yaitu faktor agama, Islam. Indonesia dengan penduduk mayoritas 85 % beragama Islam membuat negara ini mempunyai kedekatan *ukhuwah* dengan negara-negara Timur Tengah yang mayoritas atau 95 % penduduknya beragama Islam sekaligus tempat lahirnya agama ini. Kedekatan ini mendorong Indonesia ingin mengambil peranan dalam penyelesaian konflik atau masalah yang dihadapi negara-negara Timur Tengah. Ada beberapa masalah mutakhir yang saat ini dihadapi oleh negara-negara Timur Tengah yaitu : Pertama, akibat (ekses) dari pergolakan *The Arab Spring* yaitu negara-negara mengalami proses demokrasi yang memakan korban jiwa dan kerugian material yang sangat signifikan tetapi belum menunjukkan stabilitas politik hingga saat ini. Terdapat minimal 5 pergolakan politik di Timur Tengah yang menjadi perhatian Indonesia; Pertama, yaitu pergolakan Suriah ; Kedua, ancaman ketidak stabilan politik Mesir dan Libya. Ketiga, konflik Yaman – Saudi Arabia. Ke-empat, konflik internal Palestina serta Palestina- Israel, Ke-lima, pengembangan nuklir Iran

Gambaran permasalahan Timur Tengah yang rumit dan saling berhubungan membuat tidak mudah bagi Indonesia untuk mengambil peranan untuk turut menyelesaikannya. Indonesia mengalami dilemma untuk berperan karena pihak yang terlibat konflik keduanya mempunyai hubungan baik, atau permasalahan yang mererka hadapi bertentangan dengan prinsip politik dalam luar negeri Indonesia. Sebagai contoh pergolakan Suriah yang melibatkan Iran sebagai pendukung Presiden Bashar al Assad, dan Arab Saudi yang menghendaki Bashar al Assad turun dari kedudukannya, Indonesia mempunyai hubungan baik dengan semua negara tersebut. Disamping

¹ Dr.Siti Mutiah Setiawati,MA pengajar jurusan Ilmu Hubungan Internasional,FISIPOL, dan Kajian Timur Tengah , Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. Disampaikan pada Seminar Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum ,Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 18 Mei 2017

itu penggulingan kekuasaan yang syah bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Contoh berikutnya yaitu konflik Yaman – Arab Saudi yang menyebabkan Saudi kemudian membangun Aliansi militer dengan mengajak Indonesia sementara Aliansi militer bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia. Sementara dalam konflik internal Palestina yang melibatkan Hamas yang berhaluan keras dan Fatah yang radikal memerlukan kehati hatian dalam mengambil peran karena adanya potensi munculnya kelompok garis keras di Indonesia. Sedangkan dalam masalah nuklir Iran, Indonesia mempunyai prinsip penghormatan terhadap hak untuk mengurus dalam negrinya sendiri, dan tidak turut campur terhadap masalah dalam negeri negara lain. Ketidak berpihakan Indonesia terhadap pengucilan Iran oleh Amerika dan sekutunya menyulitkan Indonesia dalam menjalin hubungan baik dengan Iran maupun Amerika Serikat dan sekutunya.

Tujuan dari paper ini ialah akan mendiskusikan peranan yang sebaiknya diambil oleh Indonesia dalam turut serta mewujudkan perdamaian dunia di kawasan Timur Tengah tanpa mencederai prinsip politik dalam dan luar negeri Indonesia. Peranan yang dimaksud dalam tulisan ini artinya keterlibatan Indonesia untuk turut menyelesaikan permasalahan maupun konflik di Timur Tengah. Ada 4 peranan yang dapat diambil Indonesia yaitu sebagai; mediator atau penengah pihak yang berkonflik, fasilitator yaitu memberi fasilitas pada pihak yang konflik untuk berunding, partisipan yaitu terlibat langsung untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencegah supaya tidak muncul konflik baru misal sebagai pasukan penjaga perdamaian, dan sebagai justifikator yaitu memberi justifikasi penyelesaian konflik. Selama ini diantara peranan tersebut peranan sebagai partisipan adalah peran yang berhasil artinya kontribusi Indonesia dalam penyelesaian konflik sangat dihargai tetapi tidak mencederai kepentingan maupun prinsip politik Indonesia.

Sementara itu, sangat sulit mencari peranan ASEAN dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena: Pertama, ASEAN mempunyai prinsip ASEAN WAY yaitu tidak akan mencampuri urusan Negara lain, dan sebaliknya juga tidak bersedia dicampuri. Kedua, ASEAN yang beranggotan 10 negara, sejak awal sikapnya terbagi menjadi 3 yaitu : Kelompok Negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel seperti Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Kelompok Negara yang

mengakui eksistensi Israel dan tidak mendukung kemerdekaan Palestina seperti Singapore. Serta Kelompok Negara yang mempunyai hubungan baik dengan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina, misalnya Vietnam, Kamboja, Philipina, Dengan keadaan seperti ini sangat sulit bagi ASEAN untuk dapat mewujudkan “Posisi Bersama “ (common position), “ Tindakan Bersama” (Joint Action), “ Pernyataan Bersama “ (Joint Statement) dalam turut penyelesaian konflik Timur Tengah. Selama ini mereka maksimal hanya mengatakan”mengecam “ kekerasan , terror, perusakan yang dilakukan Israel atas bangsa Palestina. Contoh dapat dilihat misalnya dalam deklarasi ASEAN pada 25 Juli 2006 yang mengecam tindakan Israel atas bangsa Palestina. Berikut akan diuraikan mengenai peranan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah.

Indonesia dan “Musim Semi Arab “

Gerakan protes rakyat meluas di sejumlah negara Arab sejak penghujung tahun 2011 dan menumbangkan beberapa rezim diktaktor Timur Tengah yang telah berkuasa selama dua sampai empat dekade. Gerakan protes rakyat di Tunisia telah menjatuhkan rezim Zaenal Abidin bin Ali, gerakan protes rakyat Mesir telah menjatuhkan rezim Hoesni Mubarak, gerakan protes di Yaman telah menjatuhkan rezim Ali Abdullah Saleh dan gerakan protes di Libya berujung pada digulingkannya rezim Moammar Qaddafi. Kekuatan gerakan protes yang bertumpu pada media-media baru ini sungguh luar biasa. Sebab, seluruh penguasa Arab di atas tak dapat ditumbangkan oleh berbagai gerakan dengan ideologi yang kuat, pemimpin yang kharismatik, dan organisasi yang sangat rapi. Faktanya, mereka berjatuhan oleh gerakan rakyat yang justru bercirikan *less ideology, less leadership, dan less organization* itu.

Seperti telah disebutkan di awal tulisan bahwa wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang jauh dari Indonesia, dan kejadian di Timur Tengah juga terjadi di wilayah lain misalnya Afrika dan Amerika Latin. Akan tetapi karena kedekatan poersamaan agama menyebabkan Indonesia sangat peduli dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Fenomena *the Arab Spring* atau Musim Semi Arab yang seharusnya membawa perbaikan tatanan ekonomi, dan stabilitas politik karena angin demokrasi yang menjanjikan perbaikan cara berkuasa , ternyata tidak membawa perbaikan justru sebaliknya membawa bencana yang lebih parah dari sebelumnya.

Sikap Indonesia selama ini dalam menghadapi fenomena Musim Semi Arab ini terlihat lebih banyak menunggu dan berhati hati. Hal ini bisa dipahami karena Indonesia mempunyai hubungan

baik dengan negara yang mengalaminya. Mesir misalnya merupakan negara Arab yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Selanjutnya hubungan baik Mesir – Indonesia terjaga sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Indonesia mempunyai keterikatan dengan Mesir sebagai sesama negara pendiri Gerakan NonBlok, dan anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam), dan Kelompok D-8 (Development Eight) bersama dengan Turki, Iran, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria.

Beberapa saat setelah Presiden Tunisia Zine al Abidin Ben Ali meninggalkan negerinya karena didemo selama 28 hari berturut-turut, pada tanggal 25 Januari 2011 Presiden Mesir Mohammad Hosni Mubarak mengalami nasib serupa. Setelah 18 hari berturut – turut rakyat Mesir melakukan demonstrasi di Lapangan at Tahrir (Kairo) dan Alexandria pada tanggal 11 Februari 2011 akhirnya Mubarak harus menerima kenyataan keluar dari Kairo menuju kota indah Sharm al Sheikh, di Sinai. Mesir yang mempesona karena kondisi geografis dan peninggalan sejarahnya ternyata menyimpan problema legitimasi politik yang sama dari waktu ke waktu terutama sejak negeri Firaun itu menjadi Republik di tahun 1953..

Mesir adalah salah satu Negara Timur Tengah yang mempunyai posisi geografis yang sangat strategis karena terletak di Laut Mediteranean (Laut Tengah) dan Merah yang dihubungkan oleh Terusan Suez sepanjang 163 m, dan lebar 120 – 200 m. Dengan Terusan Suez yang dibangun oleh arsitek Perancis Ferdinand de Lesseps, dan diresmikan pada 17 November 1869 ini Mesir menjadi negara penghubung antara Benua Eropa, Afrika , dan Asia. Tanpa Terusan ini semua kapal dari Amerika, Eropa , maupun Afrika sendiri kalau akan menuju Asia harus melingkari Benua Afrika melewati Tanjung Harapan sehingga diperkirakan perjalanannya menjadi 3 kali lipat. Dengan kondisi ini tidak mengherankan kalau Negara Superpower khususnya Amerika dan Negara-negara Eropa mempunyai kepentingan untuk menjaga keamanan dan kelancaran perjalanan Laut yang melewati Terusan Suez. Setiap tahun dihitung ada rata-rata 20.384 kapal melalui Selat ini. Bagi Mesir sendiri Terusan ini memberi pemasukan sebesar US \$ 5 milyar, suatu pendapatan yang hampir sama dengan hutang Indonesia setiap tahun ketika pada masa CGI (Consultative Group in Indonesia) yaitu konsorsium negara-negara pemberi hutang kepada Indonesia setelah IGGI dibubarkan pada tahun 1991.

Inggris sebenarnya memberi pelajaran demokrasi yang bagus bagi Mesir dengan memperkenalkan sistem parlementer yang dituangkan ke dalam UU tahun 1923. Akan tetapi

negerae Ratu Elizabth ini selalu mencampuri urusan dalam negeri Mesir ketika sistem pemerintahan Mesir masih kerajaan. Campur tangan Inggris baru berakhir ketika terjadi penggulingan Raja Farouk yang merupakan cicit dari Muhammad Ali Pasha dari Dinasti Muhamad Ali oleh Perwira Bebas (Free Officer) pada tahun 1952 yang dimotori oleh Gamal Abdul Nasser. Raja Farouk digulingkan karena dianggap akan mendominasi politik Mesir dengan akan mengangkat putranya. Selanjutnya Inggris keluar dari Mesir pada tahun 1954.

Apabila diamati dari perjalanan politik Mesir sejak Raja Farouk hingga Hosni Mubarak , tidak ada pemimpin Mesir yang digantikan karena habis masa jabatannya kemudian ada pemilihan umum. Pemimpin Mesir, baik Raja maupun Presiden turun karena digulingkan, sakit , atau terbunuh. Fenomena ini sebenarnya juga dialami oleh Negara-negara Arab lainnya. Michael Hudson dalam bukunya *Arab Politics the Search for Legitimacy* mengamati bahwa negara-negara Arab termasuk Mesir pada umumnya mengalami problem legitimasi politik yang akut. Tanpa legitimasi yaitu pengakuan kekuasaan dari rakyat kepada penguasa maka penguasa akan sangat sulit untuk menjalankan kekuasaan dan mengendalikan konflik dalam masyarakat. Kalau secara teori bahwa sumber legitimasi politik itu ada pada Otoritas (Authority), Persamaan (Equality), dan Identitas (Identity) , sejak awal hingga Mubarak , Mesir mempunyai problem otoritas yaitu Hak untuk memimpin.

Dibawah Hosni Mubarak, Mesir tidak mengalami perubahan politik yang berarti meskipun dua orang Mesir yaitu Boutros Boustros Ghali pernah menjadi Sekjend Perserikatan Bangsa Bangsa hingga dua kali dan Mohhamad El Baradei menjadi Direktur IAEA (International Atomic Energy Agency) atau Badan Energi Internasional serta meraih Nobel Perdamaian di tahun 2005. Dengan dua tokoh ini tidak dapat dipungkiri nama Mesir dalam pergaulan internasional menjadi terangkat. Akan tetapi nampaknya masyarakat dalam negeri membutuhkan perubahan sebagai salah satu syarat pemberian dukungan menurut teori Hudson. Performa ekonomi Mesir tidak menunjukkan kemajuan yang berarti; kemiskinan mencapai 20 -40 % dari 83 juta penduduknya; pendapatan perkapita hanya \$ US 3000 bandingkan dengan Negara tetangganya Arab Saudi yang bias mencapai \$ US 40.000: inflasi 13,4 % sementara Mubarak memiliki kekayaan \$ US 40-70 milyar (Rp 357 trilyun – Rp 625 trilyun).

Pada akhirnya Husni Mubarak digantikan oleh Muhammad Musrsi di tahun 2012 karena kemenangannya dalam Pemilu yang diselenggarakan dengan terbuka. Dengan kemenangannya ini

Muhammad Mursi merupakan satu satunya Presiden Mesir yang terpilih lewat Pemilu. Akan tetapi baru satu tahun berkuasa digulingkan oleh kudeta yang dipimpin militer Abdul Fatah al Sisi yang selanjutnya menjadi Presiden Mesir yang meskipun melalui pemilu akan tetapi disangsikan sifat demokratisnya. Indonesia sangat hati hati dalam menanggapi fenomena ini mengingat Muhammad Mursi berasal dari Ikhwanul Muslimin yang dianggap bergaris keras dan menginginkan diterapkannya Syariah Islam. Kalau berpihak pada demokrasi, tentunya Indonesia akan protes terhadap kudeta militer yang memakan ratusan hingga ribuan jiwa khususnya dari pihak Ikhwanul Muslimin. Tetapi karena Indonesia juga mempunyai potensi Gerakan Politik Islam seperti Ikhwanul Muslimin maka dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin dikhawatirkan akan memunculkan Gerakan serupa. Pada akhirnya, Indonesia mendukung Abdul Fatah al Sisi dan menerima kedatangannya di Indonesia ketika menghadiri KTT Luar Biasa OKI awal Maret 2016. Kehadiran Sisi membuka lembaran baru hubungan Indonesia –Mesir karena sejak Anwar Sadat belum ada kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia.

Mesir sebenarnya dianggap sebagai mercu suar atau panduan negara-negara Timur Tengah lain. Dengan demikian , apa yang akan terjadi di Mesir pasca pergolakan dan kepergian Hosni Mubarak akan menjadi panutan bagi negara –negara Arab lain khususnya tetangganya Tunisia. Ada yang pesimis Mesir akan melalui masa kritisnya dengan mulus atas dasar militer masih memegang kendali, potensi konflik agama dan balas dendam dari pihak Ikhwanul Muslimin. Oleh karena itu, Mesir membutuhkan dukungan dari negara sahabatnya seperti Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang memerlukan proses panjang, dengan pesonanya Mesir akan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut seperti yang pernah dilaluinya ketika menyatakan kemerdekaan di tahun 1922.

Semua negara yang mengalami the Arab Spring berupaya membangun transisi politik menuju demokrasi tetapi sebagian besar gagal setidaknya sampai saat ini. Hanya Tunisia yang berhasil menjalani transisi itu dengan lebih baik,praksis demokrasi kendati negara itu juga hampir saja terjerumus ke dalam konflik bersenjata yang mencemaskan. Mediasi sejumlah kekuatan sipil dipandang menjadi kunci terselamatkannya Tunisia dari perang saudara yang kemudian berimbas pada raihan hadiah nobel yang diberitakan secara luas itu. Negara Arab springs selain Tunisia

mengalami jalan sejarah yang demikian keras bahkan terjadinya perang saudara yang beringas yang demikian destruktif dan mendalam.²

Di Libya, negara ini menjadi “rimba”, siapa yang memiliki senjata maka dialah yang berkuasa. Negeri itu dikuasai oleh ribuan milisi yang saling bertempur antara satu dengan yang lain. Kontestasi terbesar memang terjadi antara koalisi Fajr Libya yang berorientasi politik Ikhwani versus tentara pimpinan Khalifah Haftar. Akan tetapi, perebutan sumber-sumber ekonomi seperti alat produksi minyak yang masih ada, pajak, dan seterusnya diperebutkan di antara semua milisi bersenjata yang sangat beragam itu. Di tengah situasi itu, campur tangan Mesir, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan lain-lain sangat kuat. Dua yang pertama plus sejumlah negara Arab lain berada di pihak Jenderal Haftar, bahkan Angkatan Udara Mesir diyakini telah terlibat langsung dalam perang saudara di Libya. Sementara dua yang terkahir, Turki dan Qatar serta jaringan Ikhwani” berada di pihak Fajr Libya. Situasi itu masih diperparah dengan kekuatan Tandzim al-Qaida dan Daesy yang berkembang secara pesat dan memiliki kekuasaan di sejumlah teritori. Oleh karena itu, Libya diklaim sebagai salah satu *wilayah* (propinsi) Daesh. Upaya mediasi untuk mencapai perdamaian antara kelompok Haftar dan Fajr Libya di negara tersebut terus dilakukan tetapi faktanya konflik bersenjata itu masih berlangsung kendati sempat tercapai gencatan senjata tentative beberapa kali.

Di Yaman, jatuhnya rezim Ali Abdullah Shaleh ternyata berbuntut panjang. Yaman yang mempromosikan dialog nasional semula diperkirakan akan menjadi salah satu negara Arab springs yang berhasil melakukan transisi secara damai. Faktanya, transisi itu berujung pada perpecahan secara mendalam antara pihak-pihak di dalam negeri. Konflik utama yang terlihat kemudian adalah kekuatan kelompok Syiah Houtsi yang berbasis di Sha’dah (Yaman Selatan) dan pendukung mantan presiden Ali Shaleh versus kelompok pro Presiden Hadi. Akan tetapi, fakta di dalam negeri dalam konflik tersebut sebenarnya tak sesederhana itu. Lapisan dan jalinan kabilah berkelindan secara rumit dalam konstalasi konflik tersebut. Yang lebih rumit lagi, kelompok-kelompok di sana juga memiliki patron regional masing-masing. Ketika kelompok Houtsi berhasil menguasai Ibu Kota Sana’a tanpa ada sedikit pun perlawanan dari tentara Yaman, maka itu secara cepat mengundang keterlibatan Arab Saudi dan sejumlah negara Arab dalam konflik tersebut. Hingga saat ini, Yaman benar-benar terbelah; wilayah udara seluruh negeri itu dan kota Eden dan sekitarnya di Selatan dikontrol koalisi pimpinan Arab Saudi dan pendukung Hadi. Sementara

wilayah darat Ibu Kota hingga Sa'dah dikuasai milisi Housti. Beberapa wilayah lain seperti umumnya negeri yang kacau di Timur Tengah dikuasai oleh Tandzim al-Qaidah dan Daesh.³

Yang paling buruk tentu adalah di Suriah. Gerakan protes rakyat Suriah yang menuntut penjatuhan Basyar Asad dalam waktu sangat cepat berubah menjadi konflik regional yang mematikan. Negeri itu menjadi panggung perang proxy di antara kekuatan-kekuatan besar regional, bahkan internasional. Tak hanya itu, perang di Suriah telah mengakselerasi isu sektarian Sunni-Syiah secara dramatis. Upaya perdamaian di Suriah sebagaimana di Yaman juga belum menunjukkan hasil yang nyata di lapangan. Hanya genjatan senjata sangat terbatas dan sementara yang diperoleh. Terbatas dalam pengertian ini adalah teritorinya dan pihak-pihak yang menyetujui gencatan senjata. Sementara kelompok-kelompok garis keras memiliki teritori yang sangat luas yang tersambung dengan teritori mereka di wilayah Irak. Wajah baru Timur Tengah saat ini benar-benar didominasi oleh konflik dengan aktor, isu, dan dimensi yang begitu beragam. Isu sektarianisme dan ekstremisme tampak menjadi isu baru yang paling menonjol. Sementara itu upaya dan capaian perdamaian begitu minimal dihasilkan.

Akibat yang ditimbulkan oleh berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah itu menuntut dunia untuk segera terlibat dalam berbagai upaya penyelesaiannya. Salah satu akibat yang mencolok saat ini adalah gelombang pengungsi yang begitu besar yang berasal dari Suriah, Irak, Libya, dan Yaman. Jutaan pengungsi meninggalkan kampung halamannya dan mengungsi di daerah lain di dalam negeri, jutaan lainnya mengungsi di negara sekitar terutama di Turki, Yordania, dan Lebanon, dan jutaan lainnya menuju negara-negara Eropa Barat terutama di Jerman. Tragedi Aylan Kurdi, seorang anak kecil dari Kobani (baca 'Ainul Arab), yang mayatnya terdampar di perairan Turki, menjadi simbol penderitaan para pengungsi sekaligus mendorong perubahan sikap sebagian negara Eropa terhadap mereka.

Menghadapi situasi yang seperti itu tidak mudah bagi Indonesia untuk mengambil peranan. Di tengah dilema yang tengah dihadapi oleh Indonesia, pada tanggal 15 Desember 2015 lalu Putra Mahkota sekaligus Menteri Pertahanan Arab Saudi, Mohammad Bin Salman mengumumkan pembentukan "Aliansi Militer Islam" dan mengharapkan Indonesia bersedia bergabung sebagai negara yang mayoritas beragama Islam. Aliansi ini terdiri dari 34 negara diantaranya Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, Malaysia, Pakistan, dan Nigeria. Selanjutnya Menteri Luar Negeri Arab Saudi

³ ibid

Adel al Jubeir menjelaskan tujuan utama dibentuknya Aliansi Militer Islam ini ialah pembentukan koalisi negara-negara Islam untuk saling berbagi informasi , pelatihan , dan menyediakan Angkatan bersenjata dalam mengatasi militansi yang menjurus pada terorisme seperti “Negara Islam “ (ISIS) dan Al Qaeda. Apakah Aliansi ini sebuah solusi dalam mengatasi masalah terorisme dunia yang datang dari dunia Islam, atau justru menambah masalah baru ?

Aliansi ini akan berpusat di Riyad , ibukota Arab Saudi. Negara tempat lahirnya Islam dan sekaligus menjadi pemangku dua kota suci Umat Islam yaitu Mekah dan Madinah sehingga sebagian besar Umat Islam akan terikat dengan negara ini. Aliansi ini membuat Dunia Islam semakin terpecah dan terkotak kotak ke dalam kelompok-kelompok yang semakin tidak jelas kriterianya. Sebelumnya Dunia Islam terbagi menjadi Sunni dan Syiah (aliran agama), Moderat dan Radikal (sikapnya terhadap konflik internasional) , Pro Barat, Pro Timur, dan Non Blok (Ideologi) , Kaya, Menengah dan Miskin (Ekonomi). Disamping itu, negara dengan identitas berpenduduk mayoritas Islam dan cenderung moderat seperti Indonesia akan menghadapi dilemma antara menerima dan menolak. Jika menerima berarti melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif dan Non Blok yang melarang untuk turut dalam aliansi militer, kalau menolak kemungkinan akan dikucilkan dari Dunia Islam. Ada keraguan apakah pengeboman Kedutaan Indonesia di Yaman beberapa waktu yang lalu kesalahan target atau suatu kesengajaan karena sebelumnya Indonesia memang menolak untuk bergabung dengan Saudi memerangi Houthi di Yaman. Hal ini mengingatkan di jaman teknologi yang serba presisi tinggi kesalahan target kurang bisa diterima.

Aliansi dalam hubungan internasional diartikan sebagai perjanjian militer antara dua negara atau lebih yang mempersiapkan rencana penyerangan bersama atau membantu untuk menyerang secara bersama jika salah satu negara ada yang terancam diserang oleh negara lain. Jika tujuan utama Aliansi Militer Islam ini untuk memerangi kelompok “Negara Islam “ yang telah membuat aksi teror di mana-mana termasuk yang terakhir di Paris dan California maka yang akan diserang adalah basis dari Gerakan Negara Islam ini yaitu di Irak, dan Suriah. Irak adalah negara Islam yang hampir 10 tahun diduduki oleh Amerika telah jatuh menjadi negara yang terpecah belah secara sektarian. Ketidakkampuan pemerintah Irak memberi keamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya membuat negara ini dikategorikan sebagai “negara gagal”. Penyerangan terhadap negara ini dengan maksud untuk menghancurkan kekuatan “Negara Islam” akan membuat penderitaan rakyat

semakin parah mengingat rakyat sipil dapat menjadi korban dengan alasan salah target seperti yang pernah dilakukan oleh Amerika di Afghanistan.

Keadaan di Suriah tidak lebih baik, keadaan sekarang ialah imigran Suriah ke negara-negara Arab tetangganya, Eropa, Kanada, Amerika, dan Australia telah mencapai kurang lebih 3 juta orang sebagian besar wanita dan anak-anak telah menarik perhatian dunia. Peristiwa ini merupakan peristiwa kemanusiaan terbesar dan terhebat abad ini ketika orang terpaksa keluar dari bumi tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan menjadi pengungsi, orang yang terbuang atau diterima sebagai warga sangat tergantung pada negara penerima. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan dalam negeri Suriah telah porak poranda.

Negeri Sham ini telah terbelah menjadi antara yang mendukung Bashar al Assad yang baru saja memenangi 88,7 % suara dalam Pemilu Presiden pada Juni 2014 lalu, dan yang menginginkan Bashar al Assad turun atau sering disebut sebagai kelompok oposisi. Kelompok Oposisi terbagi menjadi kelompok-kelompok Al Nusra yang baru saja dikategorikan oleh AS sebagai kelompok teroris, “Negara Islam”, Tentara Suriah Merdeka (Free Syrian Army), dan Dewan Militer Tertinggi (Supreme Military Council). Negara pendukung juga terpecah, Amerika Serikat sangat menginginkan Bashar al Assad turun, tetapi Rusia mendukung Bashar al Assad. Meskipun demikian, baik Amerika maupun Rusia sama-sama akan memerangi “Negara Islam”. Sungguh merupakan situasi yang tidak mudah kalau akan memerangi “Negara Islam” dengan membangun Aliansi Militer yang juga mengatasnamakan Islam. Sepertinya mendorong koalisi Amerika – Rusia untuk mengatasi meluasnya terorisme yang dilakukan oleh “Negara Islam” di Suriah akan lebih mudah daripada membangun Aliansi Militer Islam yang menyulitkan posisi negara Islam lain yang tidak mendukung.

Sementara itu, tiga hari setelah diumumkan Aliansi Militer Islam, Amerika Serikat juga menyelenggarakan Konferensi di New York yang mengundang 20 negara yang berkepentingan di Suriah seperti Iran, Rusia, dan China untuk menyelesaikan konflik di Suriah. Syarat utama keberhasilan perundingan adalah jika hasil perundingan dapat diterapkan secara mudah dan realistis. Dalam pertemuan ini, sebelum berunding Vladimir Putin meyakinkan Bashar al Assad bahwa Rusia tetap akan mendukung kekuasaannya, sementara Amerika melalui Menteri Luar Negerinya John Kerry mengatakan bahwa Rusia telah melukai Amerika karena mendukung Bashar al Assad. Dalam waktu bersamaan keduanya mengatakan siap bekerja sama untuk

menghentikan konflik di Suriah. Pada akhirnya konferensi ini tidak menghasilkan penyelesaian apapun seperti janji mereka untuk mengakhiri konflik Suriah. Disamping itu, baik Amerika dan Rusia dua negara yang saat ini brkepentingan atas penyelesaian konflik di Suriah belum terbaca sikapnya atas aliansi mileter Islam ini.

Dari beberapa Aliansi militer yang pernah didirikan untuk mengatasi ancaman sekarang yang besar tinggal NATO (North Atlantic Treaty Organization) yang didirikan pada tahun 1949, dan ANZUS (Australia ,New Zealand, United States) yang didirikan pada tahun 1951. Aliansi militer yang lain seperti Pakta Warsawa, Pakta Baghdad, SEATO , dan CENTO sudah bubar karena tidak adanya musuh bersama yang harus diatasi bersama, dan kurang solidnya anggota. Nasib yang sama kemungkinan akan dialami oleh Aliansi Militer Islam karena yang dianggap musuh berada di organ tubuh mereka, menghancurkan mereka tidak mungkin tanpa melukai diri sendiri yaitu komunitas Islam. Sedangkan sikap Indonesia sudah jelas dan tegas bahwa aliansi militer bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Hubungan Indonesia – Palestina

Pada tanggal 5 Juni 2017 nanti akan 50 tahun Perang 6 hari antara Israel dengan negara-negara Arab khususnya Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak. Hal itu berarti sudah 40 tahun Israel menduduki wilayah milik pihak Arab yaitu Jalur Gaza, West Bank, dan Dataran Tinggi Golan. Berbagai upaya perdamaian telah diupayakan agar Israel bersedia mengembalikan wilayah tersebut, tetapi hingga saat ini upaya-upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang berarti. Sejak awal persoalan konflik Arab Palestina – Israel muncul pada tahun 1948, Indonesia yang baru saja merdeka telah menunjukkan dukungannya pada kemerdekaan bangsa Palestina untuk memperoleh kembali wilayahnya.

Pada masa awal kemerdekaan dibawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia -Afrika pada tahun 1955 dalam rangka menjalin kerjasama sesama Negara yang baru saja merdeka di kawasan tersebut. Dalam acara itu Mufti Jerusalem Haji al Amin al Husseini diundang untuk mewakili Palestina. Undangan tersebut sebagai perwujudan dukungan Indonesia atas perjuangan bangsa Palestina. Dukungan tersebut juga ditunjukkan dengan penolakan Presiden Soekarno untuk mengundang Israel. Pada tahun berikutnya ketika

terjadi Perang Seuz pada tahun 1956 meskipun tak lagi melibatkan secara langsung bangsa Palestina, tetapi Perang tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari Perang 1948, sehingga Indonesia merasa terpanggil untuk mengutuk serangan koalisi Inggris, Perancis, dan Israel atas Mesir.

Dukungan Indonesia terhadap nasib bangsa Palestina sangat berkaitan dengan sikap Negara-negara Arab atas kemerdekaan Indonesia. Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengakuan internasional tidak secara otomatis diperoleh. Indonesia harus melalui beberapa perundingan dengan Belanda sampai pada akhirnya kedaulatan Indonesia secara Internasional diakui pada 27 Desember 1949. Negara Arab yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia tersebut adalah Mesir diikuti oleh Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon ,kemudian dilanjutkan oleh pengakuan Liga Arab.

Dukungan Negara-negara Arab atas kemerdekaan Indonesia sangat mungkin didorong oleh solidaritas sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam. Sebagaimana besar Negara Arab menempatkan faktor Islam sebagai faktor penting dalam kebijakan politik luar negeri mereka baik sebagai faktor motivator, legitimator, maupun justifikator.⁴ Meskipun demikian, peranan Islam dalam hubungan Negara-negara Arab dengan Indonesia lebih didorong hanya sebagai motivator sebagai sesama negara yang mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa baik Indonesia maupun Negara Arab seperti Mesir dan Suriah pada waktu itu orientasi politik luar negerinya cenderung ke Sosialis dan dekat dengan Negara –negara Komunis seperti Uni Soviet, Cina, maupun Korea Utara.

Selanjutnya pada masa Orde Baru, Islam kurang mendapatkan tempat atau posisi di lapangan politik. Sehubungan dengan sikap pemerintah tersebut, hubungan dengan Negara-negara Arab terasa tidak intensif. Pemerintahan di awal Orde Baru yang para Mentrinya sebagian besar intelektual kemungkinan besar khawatir bahwa kedekatan Indonesia dengan negara-negara Arab dapat membangkitkan potensi oposisi kelompok Islam di dalam negeri yang nampaknya dianggap mempunyai kemungkinan untuk menggoyang kekuasaan seperti yang dikhawatirkan oleh Jamie Mickey : ” *the most striking feature of Islam under the New Order is that despite all efforts of the*

⁴ Adeed Dawisha dalam bukunya *Islam in Foreign Policy* menulis: “...one reason for this methodological ambiguity is the difficulty involved in determining whether Islam acts as a motivator , legitimator or simply a justifier for a particular foreign policy, hal 5

*states apparatus to control or tame the Muslims as political force or a potential force of opposition to the regime , their solidarity and mass backing has remained remarkably intact.*⁵

Hal yang perlu harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Indonesia ialah massa Islam yang mempunyai logika yang berbeda dengan perhitungan-perhitungan politis ekonomis para pembuat kebijakan. Kesalahan mengabaikan faktor Islam telah menyebabkan Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab ketika masalah Timor Timur dibicarakan dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1986.

Sampai menjelang tahun 1990-an , Indonesia lebih suka menjaga jarak dengan negara-negara Arab, karena negara-negara Arab dikhawatirkan akan mempengaruhi kelompok Islam di dalam negeri. Menurut istilah Michael Leifter bahwa faktor Islam dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia dianggap lebih sebagai tantangan dan bukan dukungan. Tepatnya dikatakan : *” Islam has entered the foreign policy process more by way of challenge than by way of support.”*⁶

Sikap menjaga jarak terhadap Negara-negara Arab dan kurang memberi tempat pada kelompok Islam kemudian berubah dengan diijinkannya pembukaan Markas Besar PLO di Jakarta dengan Duta Besar I yaitu HE Ribbi Awwad yang sempat tertunda beberapa tahun. Perubahan ini sangat dipengaruhi oleh perubahan situasi internasional yaitu dengan berakhirnya Perang Dingin yang menyebabkan runtuhnya Tembok Berlin, Negara Adidaya Uni Soviet, Negara-negara Eropa Timur khususnya kasus Bosnia-Hezergovina, Perang Teluk, perubahan situasi konflik Arab – Israel dengan upaya perundingan Madrid pada tahun 1991, dan perundingan Oslo 1993.

Upaya mendekati Negara-negara Arab merupakan upaya untuk menunjukkan pada dunia internasional Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina. Presiden Soeharto memilih Yordania sebagai Negara tujuan utama untuk membuka hubungannya dengan Negara-negara Arab lain. Pada November 1996 Presiden Soeharto membalas kunjungan Raja Hussein yang dilakukan 10 tahun sebelumnya.

Yordania dipilih sebagai Negara tujuan Presiden karena Yordania memang dikenal sebagai Negara kerajaan yang moderat yang mempunyai kebijakan ulur tarik terhadap kelompok Islam di

⁵ Jamie Mickey, dalam Hall Hill , *Indonesia's New Order , the Dynamics of Socio Economics Transformation*, hal 178

⁶ Michael Leifter , *the Islamic factor in Indonesia's Foreign Policy: a Case of Functional Ambiguity* , dalam Adeed Dawisha; *Islam in Foreign Policy*, hal 158

dalam negeri sehingga Indonesia dapat belajar dari sana. Disamping itu, Yordania juga dikenal sebagai Negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan Yordania sebagai Negara ketiga untuk berhubungan dengan Israel mengingat Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel sebagai konsekuensi dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Dalam kunjungannya ke Yordania secara eksplisit Presiden Soeharto menyatakan dukungannya atas kemerdekaan Palestina dengan ibukota Yerusalem. Langkah mendekati Negara – Negara Arab dan dunia Islam dilanjutkan dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Mentri OKI /Organisasi Konferensi Islam yang ke 24 di Jakarta pada Desember 1996.

Disamping itu, kunjungan Presiden Soeharto ke Yordania dimaksudkan untuk meredakan protes di dalam negeri yang memperlumahkan penerimaan Presiden Soeharto atas kunjungan Perdana Mentri Israel Yizak Rabin pada tahun 1994 setelah Perundingan Oslo ditandatangani. Pertemuan di Jakarta dilanjutkan dengan pertemuan tidak resmi antara kedua kepala Negara dan pemerintahan di Washington DC pada tahun 1995. Kedua pertemuan tersebut dicurigai sebagai penjajagan dibukanya hubungan diplomatik Indonesia – Israel.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia pada umumnya masih belum dapat menerima pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel . Terdapat tiga pendapat mengapa masyarakat menolak pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama, karena Israel masih menduduki / menjajah wilayah dan bangsa Palestina, Kedua, pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel melanggar prinsip politik luar negeri yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Ketiga, pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel akan merusak hubungan Indonesia dengan Negara-negara Arab meskipun dua Negara Arab yaitu Mesir dan Yordania telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.

Wacana dibukanya hubungan diplomatik dengan Israel dilanjutkan oleh Presiden Aburrahman Wakhid yang menjadi anggota Yayasan Simon Peres. Dalam perhitungan Presiden Wakhid pada waktu itu dibukannya hubungan diplomatik dengan Israel akan lebih menguntungkan Indonesia mengingat negara Yahudi tersebut merupakan satu-satunya negara industri maju di Timur Tengah. Dengan melihat reaksi masyarakat, maka pembukaan diplomatik dengan Israel dianggap belum

waktunya.⁷ Terlebih lagi dengan serangan Israel atas Gaza secara periodik sejak tahun 2008 , pembangunan pemukiman Yahudi yang terus berlanjut, diskriminatif terhadap penduduk Arab di Israel, penahanan orang-orang Palestina tanpa proses pengadilan, dan tidak dikembalikannya wilayah pendudukan yaitu : Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan West Bank termasuk kota Jerusalem maka pembukaan diplomatik dengan srael dianggap tidak sesuai dengan amanah UUD 1945 khususnya mengenai dukungan Indonesia atas kemerdekaan negara dan penghapusan penjajahan.

Presiden Jokowi dan Timur Tengah

Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina masih konsisten hingga Presiden Joko Widodo . Komitmen tersebut dapat dideteksi ketika Presiden Jokowi menerima permintaan Maroko dan OKI agar Indonesia menjadi penyelenggara KTT OKI Luar Biasa di tahun 2016. Alasan penerimaan Indonesia menjadi tuan rumah KTT OKI yang akan diselenggarakan pada 6 – 7 Maret 2016 karena Indonesia ingin berperan sebagai penengah konflik internal Palestina antara Hamas dengan Fatah agar Negara Palestina merdeka cepat terwujud. Apakah Indonesia dapat menjadi penengah yang baik dalam konflik ini, adalah pertanyaan yang jawabannya ditunggu oleh masyarakat internasional.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dahulu disebut Organisasi Konferensi Islam adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara Islam atau Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Latar belakang berdirinya OKI ialah munculnya solidaritas Islam ketika Masjidil Aqsa di Jerusalem dibakar oleh seorang Yahudi pada 21 Agustus 1969. Pada 22-25 September 1969 beberapa Negara Islam bertemu di Rabat , Maroko sepakat mewujudkan solidaritas Islam dalam organisasi. Indonesia sejak awal menunjukkan dukungan terhadap OKI dengan menghadiri Konferensi OKI di Jeddah pada tahun 1972. Akan tetapi Indonesia menolak untuk menandatangani Deklarasi OKI yang menyebutkan anggota OKI adalah Negara Islam. Indonesia pada akhirnya bersedia menandatangani Deklarasi OKI menjelang kejatuhan Presiden Soeharto di tahun 1998.

⁷ Mentri Luar Negeri Indonesia pada waktu itu yaitu Ali Alatas, menegaskan setelah pertemuan Yitzak Rabin – Soeharto , Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dalam waktu dekat ini.

Peranan Apa yang dapat dimainkan Indonesia ?

Ada beberapa peranan yang biasa dimainkan oleh suatu negara dalam penyelesaian suatu konflik antar Negara atau kelompok yaitu : Mediator, Fasilitator, Justifikator, dan Partisipan. Dalam hal penyelesaian konflik Arab - Israel Indonesia telah menunjukkan peranannya terutama sebagai partisipan atau pihak yang berpartisipasi aktif mengimplementasikan perdamaian dengan mengirimkan Pasukan Perdamaian ke Sinai Pasca Perang Sinai 1956 yang tergabung di dalam UNEF (United Nations Emerging Forces) , dan ke Lebanon khususnya setelah serangan Israel atas Lebanon Selatan di tahun 2006 yang kemudian tergabung dalam pasukan Perdamaian PBB UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon). Dua peranan ini sepertinya berjalan lancar hingga saat ini meskipun Israel pernah menolak pasukan perdamaian asal Indonesia yang dinilai terlalu berpihak pada Palestina.

Akan tetapi jika Indonesia menginginkan berperan sebagai mediator atau penengah, saat ini kasus yang dihadapi bukan antara Arab Palestina dengan Israel tetapi sesama Palestina. Syarat utama menjadi mediator ialah netral, mengetahui permasalahan yang menjadi sumber konflik utama maupun pendukung, dan diterima serta dipercaya oleh kedua belah pihak.

Konflik internal Palestina yang dimaksud ialah konflik antara Hamas dengan Fatah yang merupakan unsur utama bangsa Palestina. Hamas atau Gerakan Perlawanan Islam didirikan oleh Ahmad Syah Yassin pada tahun 1987. Gerakan ini sejak awal termasuk Gerakan Politik Islam yaitu Gerakan yang bertujuan menerapkan hukum Islam (Syariah Islam) sehingga Negara Palestina merdeka yang dicita citakan adalah Negara Islam. Sangat kontras dengan Fatah yang didirikan oleh Yasser Arafat pada tahun 1967, mencita citakan Palestina merdeka nanti merupakan Negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan Negara. Perbedaan ideologi ini tidak mudah disatukan ataupun dikompromikan karena perbedaan ini justru merupakan identitas yang menjadi daya tarik dukungan masing-masing.

Dukungan terhadap Hamas nampak pada kemenangannya dalam pemilu Otoritas Palestina pada tahun 2006 . Kemenangan ini tidak diakui Israel maupun Amerika dan selanjutnya dianulir. Sikap Negara lain terhadap kemenangan Hamas menunjukkan dukungan mereka terhadap Fatah yang dikenal moderat. Cara perjuangan Hamas sebagai Gerakan Politik sering menggunakan kekerasan sehingga Gerakan ini dikategorikan sebagai Gerakan teroris khususnya oleh Amerika

Serikat. Perbedaan kontras diantara keduanya ditambah dengan perlakuan tidak demokratis terhadap kemenangan Hamas membuat kedua kelompok ini terlibat perang pasca 2006 yang menelan korban sedikitnya 600 orang Palestina dari kedua belah pihak. Selanjutnya Fatah yang kemudian pemimpinnya yaitu Mahmoud Abbas menjadi Presiden yang menguasai wilayah Otoritas Palestina (Palestinian National Authority) yang sebagian besar berada di West Bank, sementara Hamas dibawah kepemimpinan Khaled Messal seolah menguasai seluruh Jalur Gaza.

Perbedaan ideologi mengakibatkan perbedaan yang lain yaitu perbedaan sikap dalam menghadapi Israel. Hamas cenderung tidak kompromi dan tidak bersedia mengakui eksistensi Israel , serta sering dituduh melakukan serangan roket Katyusha ke arah wilayah territory Israel. Akibatnya, Israel pernah membombardir Gaza di tahun 2008 dan 2014 yang mengakibatkan kerusakan dan korban massiv di pihak Hamas maupun warga Gaza. Sementara Fatah cenderung moderat, mengakui eksistensi Israel dan bersedia berunding dengan Negara Yahudi ini.

Dengan latar belakang seperti tersebut di atas jika ingin mendamaikan keduanya dengan berperan sebagai penengah atau mediator selain harus netral terhadap perbedaan mereka , Indonesia juga harus dipercaya oleh kedua belah pihak. Untuk syarat yang terakhir sepertinya Indonesia telah mendapatkan yaitu dengan kunjungan Mahmoud Abbas ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Sedangkan dari pihak Hamas , Indonesia diakui sebagai Negara yang berjasa membuka perbatasan Rafah dengan Mesir ketika Gaza diserang Isarel tahun 2008, dan pembukaan Rumah Sakit di Gaza yang didukung oleh Palang Merah Indonesia dan Mer C.

Kepercayaan terhadap Indonesia bertambah karena Indonesia menjadi anggota “Committee on al Quds” yang didirikan pada tahun 1975, anggotanya terdiri dari 15 negara dari 50 negara anggota OKI. Komite ini merupakan bagian dari OKI yang diantaranya bertugas mengimplementasikan Resolusi-resolusi konflik Arab Israel khususnya yang berhubungan dengan masalah al Quds (Jerusalem) dalam konflik tersebut. Seperti diketahui bahwa masalah Jerusalem termasuk masalah inti yang disengketakan antara Palestina dengan Israel. Bagi Hamas, Palestina merdeka kelak akan menjadikan Jerusalem sebagai ibukota, sementara Israel telah lama menjadikan Jerusalem sebagai ibukotanya meskipun belum diakui secara internasional karena masih dalam sengketa.

Indonesia dalam kerangka “Committee on al Quds “ dapat menjadikan masalah rencana pembangunan 3600 unit pemukiman Israel di Jerusalem Timur sebagai persoalan bersama Hamas dan Fatah sehingga mereka dapat bersatu. Hal ini sesuai dengan Resolusi pada KTT OKI ke -12 yang menghasilkan “Cairo Final Communiqué al Quds al Syarif” yang menghimbau masyarakat internasional untuk mengimplementasikan resolusi-resolusi yang menyangkut nasib bangsa Palestina. Biasanya masalah bersama dapat menyatukan pihak yang bersengketa selama keduanya juga mempunyai kepentingan bersama yaitu kemerdekaan Palestina yang diwujudkan secara damai mengingat korban sudah terlalu banyak.

Bagi Indonesia peranan sebagai mediator memang tidak mudah tetapi juga bukan tidak mungkin. Meskipun demikian peranan sebagai fasilitator nampaknya lebih mudah artinya kita menyediakan fasilitas perundingan, tetapi memberi kesempatan seluas luasnya pada Hamas dan Fatah untuk menemukan sendiri cara bersepakat. Indonesia sudah pernah berhasil mendamaikan Kamboja, juga Moro di Filipina Selatan dengan berperan sebagai fasilitator. Sedangkan sebagai partisipan Indonesia hingga hari ini dihargai partisipasinya dalam Pasukan Perdamaian, dan Indonesia selama tahun 2008 – 2013 telah membantu “Capacity Building” Palestina mencakup pembangunan sosial, ekonomi, pemerintahan, infrastruktur dan keuangan.

Pemerintah Jokowi langsung menindak lanjuti hasil KTT OKI dengan mendirikan Konsul Kehormatan pertama Indonesia di kota Ramalah (West Bank) . Konsul Kehormatan ini dipimpin oleh seorang wanita Palestina bernama Maha Abu Shuseh. Meskipun Israel tidak memberi ijin kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi ke Ramalah, pelantikan Konsul Kehormatan tetap dilakukan di kota Amman, ibu kota Yordania. Dengan pendirian Konsul Kehormatan ini diharapkan akan mempermudah Indonesia dalam menjalankan peranannya mendukung Palestina. Sementara itu, dari kaca mata yang pesimis langkah Indonesia ini akan menyulitkan hubungan Indonesia dengan negara-negara pendukung Israel, dan penolakan Israel atas kehadiran Ibu Menlu telah melukai kedaulatan Indonesia mengingat kota Ramalah merupakan wilayah Otoritas Palestina berdasarkan Perjanjian OSLO II tahun 1995.

Di tengah penilaian plus dan minus atas langkah Indonesia mendekati negara-negara Timur Tengah, pemerintah Jokowi terus melaju dengan mendekati Iran yang selama ini dikucilkan oleh Amerika dan sekutunya karena dituduh mengembangkan senjata nuklir. Langkah pemerintah ini termasuk langkah yang meneruskan pendahulunya yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

yang pernah mengunjungi Iran dan diterima Presiden Khatami, sedangkan masa Jokowi mengirimkan Menteri Luar Negerinya dan diterima oleh Presiden Hassan Rouhani.

Untuk menunjukkan kenetralannya dalam konflik Arab Saudi- Iran, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengunjungi Arab Saudi dan ditemui oleh Raja Salman bin Abdul Azis Al Saud di Istana al Yamamah , Riyadh pada 18 Januari 2016. Kunjungan ini dapat dianggap diplomasi menjalin hubungan yang sedikit memburuk karena penolakan Indonesia untuk bergabung dengan Aliansi Militer Islam yang diprakarsai oleh Saudi. Langkah Indonesia ini mendapat apresiasi dari pemerintah Saudi karena Indonesia adalah negara Islam pertama yang menawarkan diri untuk terlibat dalam penyelesaian ketegangan dan konflik di Timur Tengah. Istilah dalam diplomasi dikenal sebagai “Shuttle Diplomacy” seperti yang pernah dilakukan oleh Menteri Luar negri AS Condoleeza Rice dan Hillary Clinton. Pilihan ini dirasakan tepat, tidak melanggar prinsip politik luar negeri Republik Indonesia, dan efektif untuk menunjukkan peranan Indonesia yang aktif dalam turut menyelesaikan konflik di Timur Tengah, dan turut berkontribusi mewujudkan ketertiban dunia.

Yogyakarta, 18 Mei 2017

DAFTAR PUSTAKA

- Hudson, C Michael, 1977, *Arab Politics The Search for Legitimacy*, Yale University.
- Hopwood, Derek, 1985, *Egypt : Politics and Society 1945 – 1984*, Unwin Hyman, London.
- Shoukri, Ghali, 1981, *Egypt : Portrait of A President : Sadat Road to Jerusalem*, Zed Press, London
- Sullivan, Denis J, *American Aid to Egypt : 1976 – 1996, Peace Without Development*, dalam Middle East Policy, Volume IV, October 1996.
- Harian KOMPAS, 25 Januari – 14 Februari 2011
- Aly, Bachtiar, Prof, Dr, *Interaksi Iran – Irak*, Seputar Indonesia 8 Maret 2008
- Dawisa , Adeed, *Islam in Foreign Policy*, Cambridge University Press, Cambridge, London, 1983.
- Djalal, Hasyim, *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasa Warsa 1990*, CSIS, Jakarta, 1997.
- Korany, Baghdad , dan Dessouki, Hilal, *the Foreign Policy of Arab States*, Westview Press, 1984.
- Kuncahyono, Trias, *Jalur Gaza: Tanah Terjanji, Intifada, dan Pembersihan Etnis*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009
- Leifer, Michel, *Indonesia's Foreign Policy*, the Royal Institute of International Affairs, London, 1993.
- Osman , T, *Egypt on the Brink From Nasser to Mubarak*, Yale University Press Yale, 2010.
- Sihbudi, Riza, *Indonesia, Timur Tengah, Masalah dan Prospek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010
- Sukartiko, Rachmat (editor), *Dinamika Diplomasi Indonesia Dalam Praktik*, Megapoin, Bekasi, 2003.
- Forum Keadilan No 23 , 12 Oktober 2003
- Harian Kompas, 15 September 2004.
- Harian Kompas, 8 – 10 September 2006
- Harian Kompas 22 Maret 2008
- Harian Kompas, Juli – Agustus 2014

